

Implementasi Jogja Cyber Province



Presentasi:

Achmad Djunaedi

Kepala Badan Informasi Daerah (BID) Provinsi DIY

Email: achmaddjunaedi@yahoo.com

24 Mei 2008

Bagian ke 1:

Pengenalan Jogja Cyber Province

2 

Kondisi Umum Provinsi DIY

- Provinsi "kecil" (hanya 5 kab/kota), padat penduduknya.
- Sumber daya alam sedikit
- Kuat dalam bidang pendidikan, pariwisata, budaya
- Reformasi birokrasi dan e-government menjadi unggulan dalam beberapa tahun terakhir ini.
- Persentase pengakses internet paling tinggi di Indonesia (sekitar 16%).

3 

Peluang & Tantangan Saat ini

- Tantangan: Kita tidak hanya dituntut "asal bisa berjalan", saja tapi dituntut untuk "memenangkan lomba" (kompetisi antar daerah, kompetisi global).
- Peluang: kemajuan teknologi informasi tidak hanya dapat dipakai sebagai "IT enabler & support", tp juga sebagai "IT driver": mempercepat pembangunan daerah (ICT-Led Regional Development)

4 

DIY menerapkan "Jogja Cyber Province" (JCP)

JCP adalah model provinsi yang melakukan transformasi layanan yang berorientasi pelanggan (masyarakat) dengan berbasis pada proses bisnis (proses kerja), informasi dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah provinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif.

5 

Unsur-unsur Pengertian Jogja Cyber Province (JCP)

- Transformasi layanan yang berorientasi pelanggan (masyarakat)
- Berbasis pada proses bisnis (proses kerja), informasi dan pengetahuan
- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah provinsi.

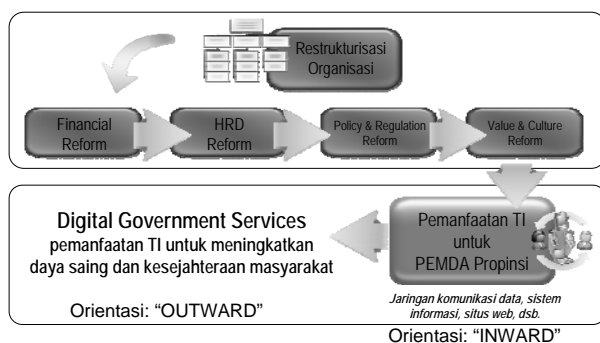
6

Transformasi layanan berorientasi “pelanggan”

- Motto ini sdh menjadi hal biasa bagi dunia usaha
- Pemerintah juga perlu mengkedepankan kebutuhan masyarakat, merubah layanannya sesuai kebutuhan masyarakat.
- Sejak thn 2000an awal, PemProv DIY telah melakukan reformasi birokrasi.

7

Perjalanan Reformasi Birokrasi di DIY



8

Berbasis pada proses kerja

- Proses kerja ditata ulang agar lebih sederhana (efisien) dan dapat dilakukan dengan dukungan teknologi informasi
- Proses kerja dilakukan secara lintas fungsi (terpadu).

9

Informasi dan pengetahuan menjadi aset

- Aset yang perlu dimanfaatkan mencakup juga: informasi dan pengetahuan.
- Pemda, swasta, masyarakat memanfaatkan informasi dan pengetahuan dalam kerja dan kehidupannya (didukung TI).
- Menuju masyarakat yg berbasis pengetahuan.

10 

Teknologi Informasi sebagai Akselerator Pembangunan

- TI punya potensi utk mempercepat proses (pengolahan data), dan mendekatkan jarak
- Layanan pemerintahan dapat dipercepat dan menjangkau lebih luas.
- Menuju perekonomian yg berbasis pengetahuan.

11 

Masyarakat yang berbasis pengetahuan

A knowledge-based society is an innovative and life-long learning society, which possesses a community of scholars, researchers, engineers, technicians, research networks, and firms engaged in research and in production of high-technology goods and service provision.

Masyarakat yg berbasis pengetahuan adalah masyarakat yg inovatif and pembelajar sepanjang usia, mewujudkan komunitas cendekiawan, peneliti, insinyur, teknisi, jejaring riset dan perusahaan yg berkecimpung dalam riset dan produksi barang-barang dan jasa berteknologi tinggi.

Sumber: World Science Forum Budapest,
http://www.sciforum.hu/index.php?image=update&content=up_knowledge_based_society

12 

Perekonomian yang berbasis pengetahuan

“The knowledge based economy” is an expression coined to describe trends in advanced economies towards greater dependence on knowledge, information and high skill levels, and the increasing need for ready access to all of these by the business and public sectors.

Perekonomian berbasis pengetahuan adalah yg mencerminkan perekonomian maju yg menuju ketergantungan yg besar ke pengetahuan, informasi dan tingkat keahlian yg tinggi, serta kebutuhan yg meningkat dlm hal tsb di dunia usaha dan pemerintahan.

Sumber: Glossary of Statistical Terms, OECD,
<http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864>

13 

Jogja Cyber Province sebagai Agenda Daerah DIY

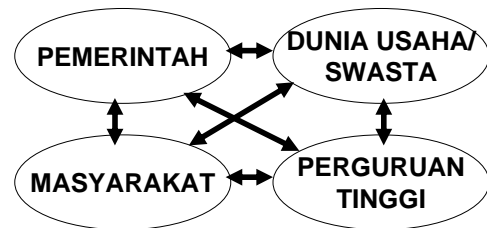
- Bukan hanya agenda pemda
- Tapi agenda pembangunan milik bersama swasta dan masyarakat serta perguruan tinggi yg ada di Prov. DIY



14

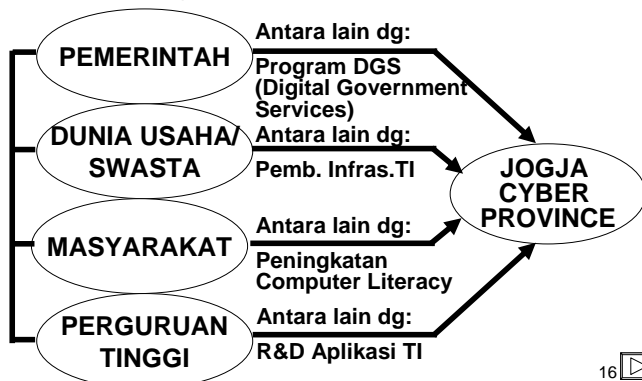
Jogja Cyber Province (JCP): Stakeholders

Pihak-pihak terkait (yang diharapkan saling bersinergi) dalam mewujudkan JCP meliputi:



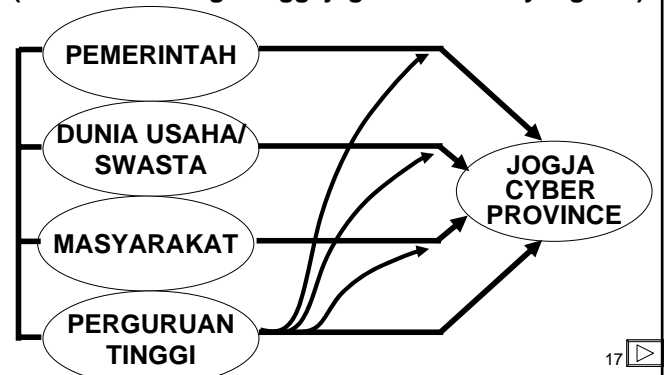
15

“Bersama Kita Bisa” menuju Jogja Cyber Province



16

“Saling Membantu” mewujudkan Jogja Cyber Province (antara lain: Perg. Tinggi juga membantu yang lain)



17

“Bersama Kita Bisa” dan “Saling Membantu” mewujudkan Jogja Cyber Province

Setiap unsur *stakeholders* mempunyai peran masing-masing utk mewujudkan JCP, tapi juga mempunyai peran membantu unsur-unsur lain.



18

Bagian ke 2:

E-Readiness di DIY

19

Lima Katagori Pengukuran E-Readiness

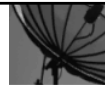


Access Learning Society Economy Policy

- ❖ Network Access
- ❖ Networked Learning
- ❖ Networked Society
- ❖ Networked Economy
- ❖ Network Policy

Sumber: <http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/forward.html>
<Diakses 14 Mei 2007>

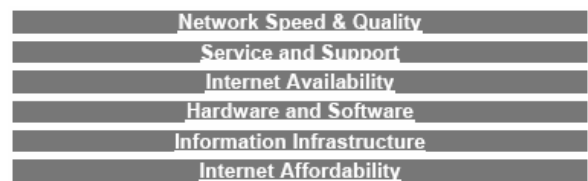
20



Network Access

Access

- ❖ Pada dasarnya: Seperti apa ketersediaan, biaya dan kualitas jejaring, layanan dan perangkat TIK?
- ❖ Yang diukur:



Sumber: <http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/forward.html>
<Diakses 14 Mei 2007>

21



Networked Learning

Learning

- ❖ Pada dasarnya: Apakah TIK sudah diintegrasikan ke sistem pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran? Apakah di komunitas sudah tersedia program untuk melatih dan menyiapkan tenaga kerja TIK?
- ❖ Yang diukur:

Schools' Access to ICTs

Enhancing Education with ICTs

Developing the ICT Workplace

Sumber: <http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/forward.html>
<Diakses 14 Mei 2007>

22



Networked Society

Society

- ❖ Pada dasarnya: Sejauh mana perorangan menggunakan TIK dalam bekerja di kehidupannya? Apakah terdapat peluang yang baik bagi perorangan yang menguasai ketrampilan TIK?
- ❖ Yang diukur:

People and Organizations Online

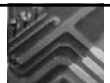
Locally Relevant Content

ICTs in Everyday Life

ICTs in the Workplace

Sumber: <http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/forward.html>
<Diakses 14 Mei 2007>

23



Networked Economy

Economy

- ❖ Pada dasarnya: Bagaimana dunia usaha dan pemerintah menggunakan TIK dalam berinteraksi dengan masyarakat dan antar mereka?
- ❖ Yang diukur:

Employment Opportunities

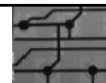
Business-to-Consumer

Business-to-Business

e-Government

Sumber: <http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/forward.html>
<Diakses 14 Mei 2007>

24



Network Policy

Policy

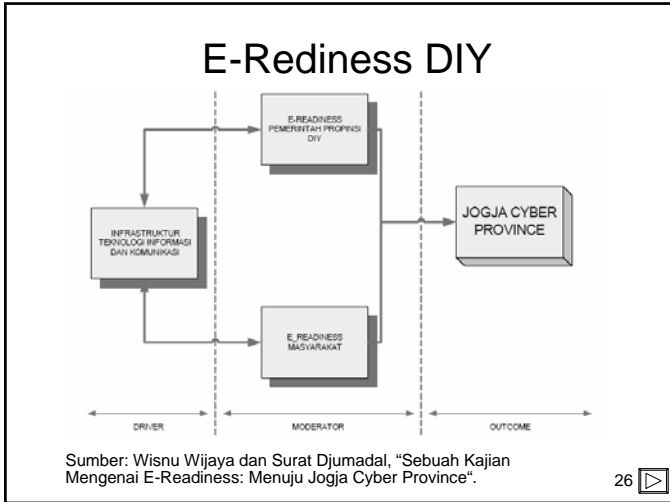
- ❖ Pada dasarnya: Sejauh mana lingkungan kebijakan mempromosikan atau mendorong pemakaian dan pemanfaatan TIK?
- ❖ Yang diukur:

Telecommunication Regulation

ICT Trade Policy

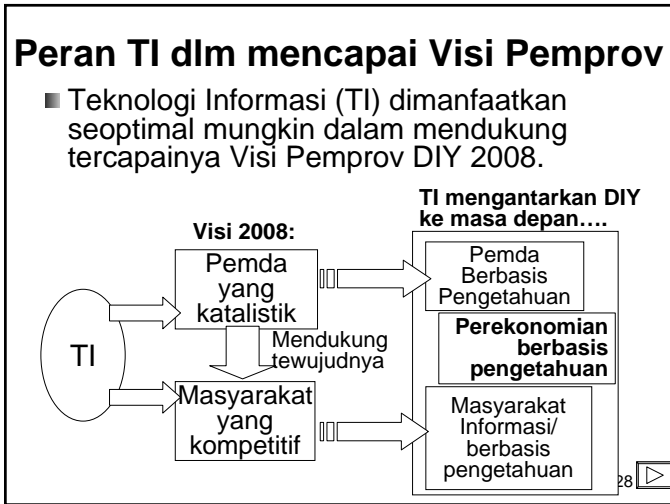
Sumber: <http://cyber.law.harvard.edu/readinessguide/forward.html>
<Diakses 14 Mei 2007>

25



Bagian ke 3:

Peran PemProv mewujudkan Jogja Cyber Province



Contoh 2: DGS Bidang UKM

- Pemerintah memberdayakan UKMK (Usaha Kecil Menengah dan Koperasi) dengan bertindak sebagai mediator atau konsultan bisnis yang menggerakkan sendi-sendi bidang industri, perdagangan dan jasa di DIY.
- Fungsi mediator ini direpresentasikan melalui layanan DIY *Small and Medium Business Development Center*, yang diharapkan mampu menarik dunia usaha (investor, pembeli, distributor, retailer, dan lain-lain) serta mampu mendorong UKMK agar cepat tanggap terhadap dinamika bisnis.

34 

Pemprov DIY mendorong pemda se DIY mewujudkan JCP

- Lima kab dan satu kota di DIY sdh mulai banyak memanfaatkan TI dalam pemerintahan
- Pengembangan layanan ke masyarakat lewat TI (termasuk lewat internet, situs web dan HP/SMS).

35 

Bagian ke 4:

Peran Swasta mewujudkan Jogja Cyber Province

36 

Peran yg diharapkan dari pihak Swasta (1)

Antara lain:

- Ikut membangun infrastruktur jaringan akses internet
- Ikut mengenalkan TI: pameran komputer/ TI, sosialisasi lewat seminar/ ceramah
- Penjualan komputer dg harga terjangkau
- Menyediakan layanan informasi (contents) untuk masyarakat, yang dapat diakses dengan peralatan TI (komputer, HP, dsb).

37 

Peran yg diharapkan dari pihak Swasta (2)

- Membangun perumahan yg sdh dilengkapi dengan akses internet
- Memperbanyak fasilitas akses internet (misal: warnet) dengan biaya terjangkau
- Pengembangan layanan untuk masyarakat secara online (koran online, siaran radio/tivi lewat internet, dsb).

38 

Bagian ke 5:

Peran Masyarakat mewujudkan Jogja Cyber Province

39 

Peran yg diharapkan dari pihak Masyarakat (1)

Antara lain:

- Terus menerus belajar memanfaatkan TI dalam kerja dan kehidupan (“melek TI”)
- Memanfaatkan TI untuk akses ke informasi dan pengetahuan (menuju masyarakat berbasis pengetahuan)
- Menggunakan TI (internet/ email dan SMS) untuk berkomunikasi.



40 

Peran yg diharapkan dari pihak Masyarakat (2)

- Pemerataan akses TI meluas dan merata ke daerah pedesaan (masyarakat pedesaan ikut berpartisipasi)
- Masyarakat membentuk kelompok-kelompok informasi masyarakat yang memanfaatkan TI utk mengumpulkan informasi, menseleksi, menyimpan, mengolah dan memanfaatkannya.



41 

Bagian ke 6:

Peran & Peluang Perguruan Tinggi mewujudkan JCP

- Peran “sendiri” menuju JCP
- Peran “pembantuan” unsur lain

42 

Peran “pembantuan” yg diharapkan dari pihak Perguruan Tinggi

Antara lain:

- Membantu Masyarakat: dengan sosialisasi dan pelatihan TI (misal sosialisasi *open source software*)
- Membantu pemda: dengan memberi konsultasi pengembangan upaya pemanfaatan TI di pemda.
- Membantu Swasta: dengan mengembangkan model-model usaha terkait pemanfaatan TI.

43 

Peran “sendiri” yg diharapkan dari pihak Perguruan Tinggi (1)

Antara lain:

- Pendidikan: Penyiapan SDM TI dari banyak aspek: teknis/ analis/ programmer, budaya TI, sosial TI, politik TI, dsb.
- SDM TI yg diperlukan Pemda: mampu bekerjasama secara *cross-functional, teamwork* (meski punya fokus, tp tdk ego-bidang).
- Pengembangan Keilmuan: keilmuan terkait TI yang lebih lengkap (tidak hanya teknologi/ teknis saja, tapi juga yg terkait, antara lain: *cyber law*, keperilakuan TI, budaya TI, dsb.)

44 

Peran “sendiri” yg diharapkan dari pihak Perguruan Tinggi (2)

- Pengab. Masyarakat: Mendorong pengembangan industri TI (dengan menumbuh-kembangkan embrio industri software, dsb).
- Pengabdian Masyarakat: Penelitian dan pengembangan pemanfaatan TI yang berguna bagi mendukung industri kecil/ kerajinan di DIY.
- Pengab. Masyarakat: KKN dan Kerja Praktek Mhs diarahkan utk membantu e-Readiness Masyarakat.

45 

Peran “sendiri” yg diharapkan dari pihak Perguruan Tinggi (3)

- Pembelajaran: Mengembangkan model-model pemanfaatan TI dalam proses belajar-mengajar
- Kurikulum: Membekali lulusan dengan kemampuan berwirausaha yang berbasis TI.
- Pelayanan Pasca Pendidikan: Memfasilitasi lulusan (dengan dukungan TI) dalam mencari informasi kerja dan mendapatkan pekerjaan.

46 

Khusus: Lulusan Yg Mampu Bekerjasama Lintas fungsi

- SDM TI yg diperlukan Pemda: mampu bekerjasama secara *cross-functional, team-work* (meski punya fokus, tp tdk ego-bidang).



- Mahasiswa dibiasakan bekerjasama dengan mahasiswa bidang lain dalam suatu pemecahan masalah tertentu (mata kuliah/ workshop lintas bidang)
- Meski ilmu “terkotak-kotak” tp jangan biarkan mind-set “terkotak-kotak” juga.
- The value of IT: kolaborasi (di Era Informasi).

47 

Masih banyak lagi peran dan peluang bagi perguruan tinggi untuk ikut mewujudkan Jogja Cyber Province...

**Terima kasih
atas perhatiannya**



48 